

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, topik penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah mengurai dan menganalisis pola konflik kekerasan antar kelompok dengan menggunakan perspektif dimensi kebudayaan kolektif dan kemudian mencari pendekatan intervensi yang tepat untuk mencegah dan menanggulangnya sehingga tercipta kondisi damai yang berkelanjutan (*sustainable peace*). Penelitian ini mengangkat judul “Intervensi Sosial terhadap Konflik Identitas Pada Masyarakat Kolektif”.

Pada bagian ini, akan disajikan literatur-literatur yang dapat membantu pencapaian tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat dalam rumusan masalah. Bagian pertama yaitu tinjauan pustaka akan menyajikan literatur-literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memahami, membedah, dan membahas lebih dalam mengenai topik penelitian. Bagian kedua akan menyajikan literatur hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain membantu peneliti dalam memahami konflik kekerasan antar kelompok pada masyarakat kolektif, penelitian terdahulu ini juga bisa menjadi acuan literatur yang menjadi pembanding dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Bagian ketiga adalah menyajikan kerangka kerja yang menggambarkan skema alur proses penelitian yang dilakukan.

2.1 Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai konflik kekerasan antar kelompok berarti membahas identitas yang terkategoriisasikan pada masing-masing kelompok (*identity group*). Identitas memainkan peran yang vital dalam fenomena konflik sosial. Oleh karena itu literatur-literatur teori dan konsep

yang disajikan tidak akan bisa lepas dari kaitannya dengan identitas khususnya identitas kelompok. Literatur yang disajikan akan dimulai dengan pembahasan mengenai identitas seperti definisi dan ragam jenisnya, serta bagaimana perspektif-perspektif mengenai identitas dapat menjadi isu dalam suatu konflik kekerasan dan konflik identitas. Bagian berikutnya akan disajikan literatur yang membahas teori mengenai kebudayaan masyarakat dan kecenderungannya dalam menyikapi identitasnya sebagai individu atau identitasnya sebagai kelompok masyarakat. Selanjutnya akan disajikan literatur yang menjelaskan mengenai perilaku kolektif khususnya mendalami kekerasan kolektif serta menyajikan teori yang menjadi tinjauan pembahasan bagaimana konflik dengan latar belakang identitas kelompok bisa terjadi. berikutnya disajikan bahan literasi mengenai intervensi sosial sebagai bentuk intervensi fenomena konflik-konflik kekerasan antar kelompok pada masyarakat kolektif dan metode analisa membuat gambaran konflik terjadi. Bagian terakhir akan dibahas mengenai community resilience sebagai tumpuan membangun ketahanan nasional.

2.1.1 Identitas

Mengantar pada pendalaman pembahasan identitas, maka berikut ini pendapat beberapa tokoh yang mendefinisikan identitas. Jolle Demmer (2013) menjelaskan Identitas sebagai istilah yang digunakan untuk mengkategorisasikan diri sendiri (*self*) dan orang lain (*other*), perusahaan dan organisasi mem-*profile* kan identitasnya, dan di dalam bidang pemasaran dan periklanan produk, bisnis, dan pelayanan memberikan merek sebagai identitasnya. Identitas digunakan untuk mendeskripsikan, melabelkan, dan mengkategorisasikan sesuatu. Identitas ini juga dapat digunakan untuk menggerakkan individu dan perilaku kelompok.

Menurut Celia Cook-Huffman "Identitas sangatlah kompleks, terikat oleh sejarah, terbentuk secara sosial, dan juga dinamis. Identitas terkadang bersifat sementara di beberapa kasus, dan juga bisa bersifat kaku dan tidak fleksibel karena mereka terkonstitusikan dalam realita

kehidupan” (Sandole, Dennis J. D, Byrne, Sean, Staroste, Ingrid Sandole, & Senehi, Jessica. (Eds.), 2011, p. 19).

Disampaikan oleh Ashmore, Gecas, Stryker, Burke, dan Widcombe (sebagaimana dikutip dari Sandole, et al, 2011) “para pembuat teori memberikan identitas untuk memberikan nama terhadap berbagai variasi fenomena yang ditemukannya. Hal ini dilakukan untuk mengklasifikasikan dan menjelaskan ruang lingkup dari pengalaman, proses, fungsi sosial sebagai *tools* analisis dan konsep teori” (p. 19). Huffman melanjutkan pemaparannya dengan memberikan berbagai pendapat ahli mengenai identitas secara lebih general. Identitas digunakan oleh seseorang untuk merasakan dirinya, bagaimana individu mengetahui dan mengerti diri mereka. Identitas membutuhkan arti, makna, dan *value* dalam suatu konteks dan kebudayaan serta membantu manusia untuk mengerti siapa diri mereka sebagai individual, sebagai penduduk yang memiliki peran khusus, dan sebagai anggota dari kelompok tertentu (Sandole, et al, 2011).

Huffman mengutip pernyataan Stets and Burke (Sandole, et al, 2011, p. 20) menyatakan:

Theorist often make a distinction between personal identity, or self-identity, and collective or social identity. Personal identity focuses on an individual's sense of him or herself as autonomous, unique person. Social identity refers to the facet of one's self. Image that derive from salient group membership

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui setidaknya ada dua bentuk kategorisasi identitas pada manusia yaitu identitasnya sebagai individu (*individual identity*) dan identitasnya sebagai anggota dari kelompok sosial (*Social identity*).

2.1.1.1 Identitas Individu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya identitas individu adalah label yang mengikat atau melekat pada diri seorang manusia. Amartya Sen (2006) dalam bukunya yang berjudul “Identitas dan Kekerasan” menyatakan pada diri seseorang yang sama pada saat yang sama dapat melekat label identitas yang beragam. Misalnya seseorang bisa sekaligus

menjadi seorang warga negara Amerika, asal Karibia, keturunan Afrika, pemeluk kristen, seorang liberal, seorang perempuan, seorang vegetarian, seorang pelari jarak jauh, seorang sejarawan, seorang guru sekolah, seorang novelis, seorang feminis, dan lain sebagainya. Masing-masing dari kelompok di atas, tempat orang yang sama menjadi bagian dari keseluruhannya secara simulatan, memberinya suatu identitas yang khas. (p. XI)

Dari contoh kemajemukan identitas yang dimiliki oleh seseorang di atas, dalam satu waktu ada identitas yang terlabelkan pada diri manusia secara otomatis, karena manusia tidak punya kemampuan untuk memilihnya misalkan identitas kewarganegaraan, ras, dan lain-lain. namun juga ada identitas yang melekat karena pilihan pribadi dari individu yang bersangkutan misalnya seseorang yang dikenal karena identitasnya sebagai novelis, guru di sekolah, atau pelari jarak jauh

2.1.1.2 Identitas Sosial

Jolle Demmers (2013) mengutarakan identitas adalah mengenai hubungan antara individual dan lingkungan sosial yang terkategori dan melakukan hubungan. Konsep identitas sosial menunjukkan bagaimana identitas terkategori ke dalam karakteristik-karakteristik semisal: kebangsaan, gender, agama, etnis yang menempatkan manusia ke dalam ruang sosialnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bagaimana suatu identitas kelompok terbentuk yaitu apabila seorang manusia yang memiliki karakteristik identitas sosial tertentu dan membagikan kesamaan karakteristik tersebut dengan yang lain. (p.21)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, identitas pada individu seseorang pastinya bersifat jamak atau beragam. Identitas sosial seseorang pun juga bersifat jamak, namun berubah-ubah tergantung dari konteks situasinya. Hal ini dijelaskan oleh Jolle Demmers (2013) bahwa identitas sosial seseorang itu dinamis dan dapat berubah-ubah tergantung pada konteks kondisinya. Pada konteks ruang kelas di Universitas, orang didalamnya dikenali berdasarkan identitas sosialnya yaitu mahasiswa dan

dosen tidak sebagai orang tua atau penganut agama tertentu. Seseorang bisa saja di identifikasikan kuat sebagai bagian dari identitas sosial keagamaan tertentu. Namun pada penggalan waktu lain dikehidupannya orang tersebut bisa memilih mengganti keyakinan, keluar dari suatu komunitas, dan melakukan transformasi terhadap dirinya. Hal ini berdampak pada perubahan identitas sosial secara dramatis yang melekat pada dirinya. Jolle Demmers (2013) juga menyatakan ada kategori identitas sosial yang bersifat lebih permanen seperti identitas gender, kebangsaan, dan/atau kesukuan. Identitas seperti ini di kategorisasikan sebagai identitas primer/ utama.

Jolle Demmers (2013) melanjutkan penjelasannya dengan memberikan gambaran mengenai identitas sosial tertentu akan sangat ditentukan oleh aturan-aturan sosial, regulasi, dan institusi atau malah memiliki ruang yang lebih terbuka untuk inisiatif. Beberapa kategorisasi cenderung dipaksakan kepada kita (bersifat eksternal) namun beberapa yang lain dapat teradopsi dari diri sendiri (bersifat internal). Setiap masyarakat sosial dikarakterisasikan secara eksplisit dan implisit oleh aturan, cerita mengenai benar dan salah, normal dan abnormal. Beberapa dari aturan ini sangat kuat dan terinstitusi, yang lain lebih dapat di negosiasikan.

Identitas sosial juga dapat di rekayasa. Ada kekuatan semisal negara yang bisa melakukan kategorisasi, klasifikasi, dan identifikasi. Jolle Demmers (2013) menyatakan kekuatan ini memiliki kemampuan untuk memberikan nama, untuk mengkategorisasikan, untuk menyatakan sesuatu itu apa dan siapa. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua kategorisasi adalah identitas sosial. Jolle Demmers mencontohkan dalam konteks mahasiswa biasanya dikategorisasi 'manusia', 'pemalas', dan 'lucu', ketiga contoh kategorisasi ini tidak menunjukkan identitas sosial. Feeron dan Laitin (dikutip dari Jolle Demmers, 2013, p.22) menyajikan definisi kategori sosial sebagai berikut:

Sets of people given a label (or labels) and distinguished by two main features: 1. Rules of membership that decide who is and who is not a member of the category.; and 2. Content, that is, set of characteristics (such as beliefs, desires, moral commitments, and physical attributes) thought to be typical of members category of behaviours expected or obliged of members in certain situations (roles)

Pada intinya Jolle Demmers (2013) menjelaskan Identitas sosial sebagai hubungan antara individual dan lingkungan sosial yang terkategori dan melakukan hubungan, yang sifatnya terberi atau dipilih. Pada setiap identitas sosial terdapat konsekuensi berupa karakteristik, aturan, dan batasan yang melekat pada identitas tersebut.

2.1.1.3 Identitas Sebagai Modal Sosial (Teori Modal Sosial)

Secara normatif identitas di pandang sebagai suatu kebaikan dan kebutuhan untuk dimiliki, tanpanya seorang manusia bisa dianggap tersesat dan lemah (Demmers, Jolle, 2013, p. 18). Terkait dampak positif dan urgensi dari identitas ini Amartya Sen (2006) mengemukakan pendapatnya:

rasa memiliki suatu identitas bukan hanya bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan percaya diri. Tidak heran bila gagasan tentang identitas memperoleh pengakuan yang begitu luas, dari seruan yang sangat umum untuk mengasihi sesama hingga teori-teori canggih tentang modal sosial dan defenisis diri komunitarian. Rasa akan identitas bisa memberi sumbangan berarti bagi kekuatan dan kehangatan hubungan kita dengan pihak lain, seperti tetangga, anggota suatu komunitas yang sama, sesama warga negara, atau penganut agama yang sama. Perhatian kita pada identitas tertentu bisa mempererat pertalian dan membuat kita bersedia melakukan berbagai hal satu sama lain dan turut membawa kita melampaui hidup yang berpusat pada diri sendiri. (p. 3-4)

Amartya Sen (2016) menilai identitas adalah modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas, bagaimana kesamaan identitas dalam suatu komunitas sosial dapat membuat kehidupan di komunitas berjalan jauh lebih baik. Untuk lebih memahami mengenai identitas sebagai modal sosial berikut ini beberapa penjelasan teori modal sosial terdapat beberapa

penjelasan mengenai teori modal sosial (*social capital theory*) untuk lebih memahami mengenai identitas sosial sebagai modal social.

Bourdieu, Coleman, Putman adalah tokoh-tokoh yang menemukan dan mengembangkan teori modal sosial (*social capital theorist*). Menurut Bourdeau *social capital* didefinisikan sebagai kumpulan dari potensi sumberdaya yang ada yang mana terhubung untuk memiliki jaringan yang berkelanjutan, kurang lebih terinstitutionalisasi dalam hubungan saling mengenali dan mengakui (Tzanakis, Michael, 2013, p. 3). Bourdieu mendefenisikan modal mengacu pada istilah yang digunakan di bidang ekonomi. Ada tiga jenis modal yang ada di masyarakat yaitu ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Ketiga jenis modal ini saling berhubungan yang nilainya saling dapat bertransformasi. (Hauberer, Julia, 2011, p. 35)

Defenisi Coleman terhadap modal sosial (Tzanakis, Michael, 2013) mendekati pandangan Bourdeieu namun sepenuhnya dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Coleman modal sosial terkandung di dalamnya aspek struktur sosial, dan fasilitasi aksi tertentu dari aktor (manusia ataupun aktor perusahaan) didalam struktur tersebut. Coleman mengadopsi jalan tengah dari dua tradisi teoritis. Pertama adalah pandangan bahwa aksi sosial dapat terjadi karena telah terkondisikan oleh struktur sosial yang ada. Kedua adalah teori rasional yang menunjukkan tujuan aktor ditentukan oleh pencarian kepentingan dirinya. Seperti halnya Bourdieu, Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya kolektif yang dapat dipakai oleh aktor dengan berorientasi pada tujuan. Social capital terkait dengan aksi kolektif dan kerjasama, kemampuan individu-individu didalam suatu kelompok untuk bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama

Putnam mengembangkan teori modal sosial oleh Coleman (Tzanakis, Michael, 2013). Putnam mendefenisikan modal sosial dengan bagian-bagian yang dalam dalam organisasi sosial seperti jejaring, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi aksi dan kooperasi untuk keuntungan bersama. social capital bukan hanya suatu aksi kolektif tetapi lebih merujuk pada elemen-elemen tertentu yang mampu membawa masyarakat ke

dalam aksi kolektif. Putnam berpendapat bekerja sama jauh lebih mudah terjadi di dalam komunitas yang memiliki modal sosial yaitu budaya saling percaya dan toleransi satu sama lainnya, rasa saling memiliki (solidaritas), informasi, kepercayaan, serta norma melakukan *reciprocity*. Dalam formulasi Putnam, modal sosial dapat ditingkatkan dari sifat individual dan kelompok kecil di komunitas lokal ke populasi yang lebih besar. Putnam menyebutkan bahwa modal sosial adalah 'pelumas *universal*' dari hubungan sosial.

Dapat terlihat ketiga pelopor teori media sosial diatas menjelaskan modal sosial (Tzanakis, Michael, 2013) sebagai kumpulan dari potensi sumberdaya yang ada di dalam struktur sosial yang didasari oleh jejaring, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi aksi dan kooperasi kolektif untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dari pengertian diatas kata kunci dari modal sosial adalah kekuatan hubungan antar individu yang terhubung kuat oleh rasa percaya yang membentuk struktur sosial yang kuat sehingga menjadi modal dalam aksi-aksi sosial yang dilakukan.

Disinilah peran identitas dalam modal sosial. identitas menjadi instrumen utama yang menjadi simbol pemersatu hubungan antar individu dan menjadi modal lahirnya kepercayaan. Seperti yang disampaikan oleh Amartya Sen (2016) kesamaan identitas dalam satu komunitas menghasilkan rasa keterikatan terhadap komunitas itu, inilah yang kemudian dipandang sebagai suatu sumber daya layaknya modal.

2.1.1.4 Konflik Identitas dan Kekerasan

Selain sebagai modal sosial dalam membangun kekuatan sosial di masyarakat berupa sumber kesejahteraan dan kehangatan, Identitas juga bisa menjadi modal lahirnya bencana kekerasan dan teror. Menurut Korostelina konflik terjadi tidak hanya berlandaskan akan kompetisi terhadap sumberdaya dan kekuasaan, melainkan bisa terjadi karena persoalan identitas komunal baik ras, agama, etnis, dan kelompok-kelompok identitas lainnya (Sandole, et al, 2011). Konflik yang didasari oleh

persoalan identitas itu yang didefinisikan sebagai konflik identitas. Amartya Sen (2006) berpendapat:

Identitas juga bisa memicu pembunuhan dan membuat orang mati dengan sia-sia. Rasa keterikatan yang kuat (dan eksklusif) pada suatu kelompok bisa mengandung di dalamnya persepsi tentang jarak dan keterpisahan dari kelompok lain. Kesetiakawanan kelompok bisa memicu tumbuhnya perselisihan antar kelompok. Kita bisa saja sekongong-konyong diberitahu bahwa kita bukan Cuma warga negara Rwanda melainkan lebih khusus lagi orang Hutu (“kita benci orang Tutsi”), atau bahwa kita sesungguhnya bukan sekedar warga Yugoslavia melainkan sebenarnya orang Serbia/ Kita sama sekali tidak menyukai orang-orang Muslim (p. 4)

Huffman memaparkan, “konflik yang meradang di Rwanda dan Yugoslavia dengan latarbelakang identitas. Konflik dapat terpicu dan meradang karena kepentingan identitas, selain itu identitas juga dapat terbentuk dan bertransformasi dalam konflik yang terjadi karena persoalan identitas” (Sandole, et al, 2011, p. 25)

Bagaimana peran identitas dalam konflik dipaparkan oleh Celia-Cook-Huffman (Sandole, et al, 2011) sebagai berikut: Individu memiliki rasa di dalam diri untuk memiliki identitas atau pencitraan yang dinginkannya untuk dilihat oleh orang lain. rasa ini menggabungkan sifat, ciri, dan keterampilan tertentu bersama dengan deskripsi dan evaluasi diri yang tesatukan dalam identitas pribadi. Hal ini lah yang disebutkan oleh Celia Cook Huffman sebagai *Identity needs* yaitu keinginan untuk memiliki *self-image* atau “*face*” yang baik. Identitas menjadi sumber permasalahan konflik apabila ada ancaman terhadap *identity needs* dan/atau mendapatkan perlakuan yang membuat individu/ group merasa kehilangan muka (*face loss*). Hal inilah yang seringkali menjadi awal mula lahirnya ketidaknyamanan, perselisihan, respon defensif, yang mana akan mengeskalasi atau mempertajam konflik yang berujung pada aksi kekerasan.

Celia-Cook-Huffman (Sandole, et al, 2011) juga menggunakan teori *basic human needs* yang dikembangkan oleh John Burton di akhir tahun 1970-an untuk menjelaskan peran identitas dalam konflik. Teori *Basic*

Human Need secara umum menjelaskan bahwa konflik terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar (*basic needs*) individu/ kelompok. Burton menjelaskan terdapat kebutuhan mendasar yang bersifat universal dan tidak dapat di negosiasikan. Empat kebutuhan mendasar yaitu pengembangan personal, sekuritas atau keamanan, pengakuan, dan identitas adalah kunci untuk memahami konflik kekerasan sosial. konflik yang dilandasi oleh Identitas menjadi sangat sulit diselesaikan karena seringkali permasalahan yang berhubungan dengan identitas tidak dapat dinegosiasikan.

Kekerasan adalah ekspresi tragis dalam memenuhi kebutuhan manusia, hal ini menyiratkan bahwa segala hal yang dilakukan manusia adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kenyataannya biasanya individu/kelompok merepresentasikan interests mereka, namun bukan needs yang sebenarnya, walaupun demikian mereka akan mempergunakan kekuatan dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila kita memahami “needs” kelompok sendiri dan kelompok lain serta mengetahui bagaimana kita dan mereka memenuhi kebutuhan tersebut maka kita dapat melakukan pendekatan yang dapat mencegah kekerasan dan konflik kekerasan.

Dua *roots of conflict* yang dilatar belakangi identitas ini yaitu Kehilangan muka (*face loss*) dan tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar (*basic needs*) belum cukup untuk menjelaskan kenapa di dunia ini terjadi *ethnic cleansing* atau pemusnahan suatu kelompok identitas oleh identitas kelompok lainnya. Ada kecenderungan manusia untuk menjadikan kelompoknya menjadi identitas yang terbaik inilah yang disebutkan oleh Amartya Sen (2006) sebagai sebuah ilusi untuk melihat identitas manusia yang tunggal. Berikut ini kutipan penjelasannya:

Sikap keras untuk mendesakkan, meski hanya tersirat, suatu identitas manusia yang tunggal dan tanpa pilihan tidak hanya akan membuat kita menjadi kerdil, melainkan pula akan membuat dunia jadi jauh lebih membara. Pemikiran alternatif terhadap pengkotak-kotakkan kategorisasi itu bukanlah dengan melontarkan klaim tak realistis bahwa kita semua sama saja. Nyatanya kita memang tidak sama. Harapan utama bagi terwujudnya harmoni di dunia yang kacau ini justru terletak pada kemajemukan identitas kita, yang

saling bersangkutan paut dan menentang pemilahan-pemilahan tajam seturut satu garis pengelompokan tunggal yang katanya tak bisa diganggu gugat. Nilai kemanusiaan diantara kita dipampatkan ke dalam satu sistem kategorisasi tunggal yang semena-mena (p. 23-24)

Teori yang dapat membedah hal ini adalah dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Henri Tajfel (1981) dan yang lainnya (Tajfel and Turners, 1979) yaitu *social identity theory* (akan dijelaskan lebih lanjut)

2.1.2 Dimensi Kebudayaan: Individualisme-Kolektivisme

Penelitian yang akan dilakukan akan melandaskan pada tinjauan sosial masyarakat yang memiliki dimensi kebudayaan kolektivisme, dengan hipotesis bahwa bangsa Indonesia, khususnya Kota Makassar memiliki dimensi kebudayaan kolektivisme yang tinggi. Oleh karena itu tinjauan pustaka yang disajikan pada bagian ini harus membahas mengenai dimensi kebudayaan kolektivisme dan kebudayaan *opposite*-nya yaitu Individualisme. Teori yang akan disajikan adalah teori yang dikembangkan oleh Geert Hofstede (1997) sejak tahun 1960-an. Hasil studi pertamakali dipublikasikan pada tahun 1980 dengan subjek "*Cultural Consequences*". Subjek ini muncul ketika Gert Hofstede tertarik oleh perbedaan budaya antar bangsa dan antar organisasi yang dialaminya saat bekerja di IBM yaitu salah satu perusahaan IT *level* international. Pengalaman di perusahaan ini membuat Hofstede terlibat dan mengalami pekerjaan dengan berbagai kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Tujuan dari penelitian Geert Hostede ini adalah membantu memahami dan mengelola perbedaan dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku orang-orang di seluruh di dunia. Ini akan memperlihatkan walaupun ada begitu besar perbedaan dalam pikiran manusia, namun ada struktur di dalam variasi mendasar yang mana akan membantu untuk saling memahami. (Hofstede, 1997)

2.1.2.1 Budaya Sebagai Program Mental

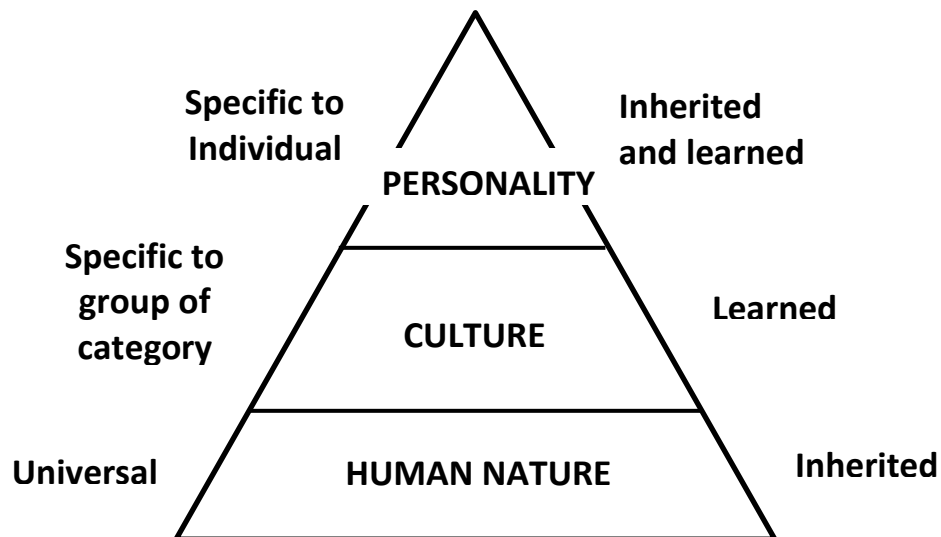
Hofstede (1997) menyatakan Setiap manusia didalam dirinya membawa suatu pola dalam berpikir, merasakan, dan potensi berperilaku yang mana telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Kebanyakan telah diperolehnya pada masa kecilnya, karena pada masa itulah seseorang paling mudah untuk dipengaruhi untuk mempelajari atau mengasimilasi sesuatu. Pola ini dengan menggunakan analogi program pada komputer disebut Hofstede sebagai "*software of mind*".

Hofstede (1997) menyatakan, sumber lahirnya mental program ini terdapat di dalam lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh besar dan mendapatkan pengalaman hidupnya. Program tersebut lahir dari interaksi sosial di dalam keluarga, antar lingkungan tetangga, di sekolah, di dalam kelompok pemuda, di tempat kerja, dan di komunitas masyarakat.

Istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan *software* mental ini adalah budaya (*culture*). Dalam ilmu sosial antropologi "budaya" adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan semua pola berpikir, merasakan, dan berperilaku dari sekelompok manusia. Bahkan budayapun melingkupi bagaimana mengucapkan salam, makan, yang perlu ditampilkan, menjaga jarak fisik dengan orang tertentu, berhubungan cinta, ataupun menjaga kebersihan tubuh. Pengertian budaya ini lebih fundamental daripada memandang budaya hanya dengan defenisi peradaban atau kemurnian dari pemikiran seperti pendidikan, seni, ataupun literatur-literatur. Pengertian ini yang digunakan oleh Hostede (1997) dalam menggunakan kata budaya dalam berbagai pembahasan teori-teorinya.

Hofstede (1997) kemudian melanjutkan penjelasan mengenai budaya sebagai sesuatu yang dipelajari, tidak diwariskan. Budaya diperoleh dari lingkungan sosial bukan dari gen keturunan. Hofstede juga berargumen bahwa perlunya memparsialkan antara budaya dengan *human nature* atau sifat dasar manusia. *Human nature* adalah segala sesuatu yang dimiliki sama oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Human nature bersifat universal seperti kemampuan untuk merasakan takut, marah, cinta, kesenangan, kesedihan, kebutuhan untuk berhubungan baik dengan orang

lain, untuk bermain dan melatih diri, dan kemampuan untuk meng-observasi lingkungan. Namun demikian, segala sesuatu yang membuat marah, senang, dan lain sebagainya dalam *human nature* dimodifikasi atau ditentukan oleh budaya.



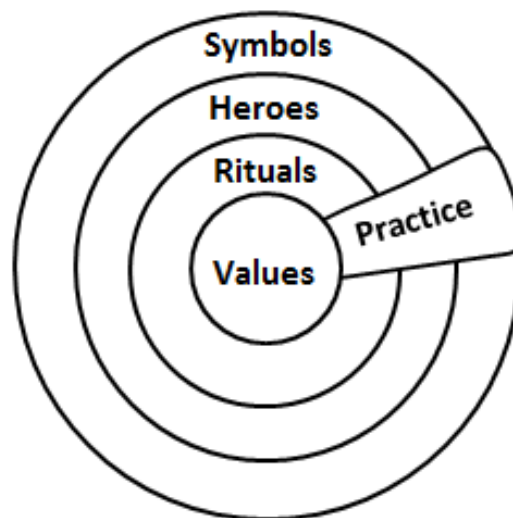
Gambar 2.2 Tiga Level dari Keunikan Program Mental Pada Manusia

Sumber: Hofstede, Geert. (1997).

Di sisi lain Hofstede (1997) menjelaskan mengenai personaliti dari individu sebagai mental program yang secara khas dimiliki oleh manusia. Personaliti lahir dari kekhasan sifat yang diturunkan oleh gen keluarga dan sebahagian lagi dia pelajari pada “budaya” di lingkungan masyarakatnya.

Budaya memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara. Hofstede (1997) menggunakan istilah *symbols*, *heroes*, *rituals*, dan *value* untuk menjelaskan manifestasi budaya. Secara garis besar dapat dilihat pada gambar 2.3 manifestasi budaya diilustrasikan seperti bawang yang mempunyai beberapa tingkat lapisan,. *Symbol* berada di kulit yang paling luar. *Symbol* dapat berupa kata-kata, gestur, gambar, atau benda yang mengandung makna budaya di dalamnya. *Heroes* adalah sosok orang, hidup ataupun telah meninggal, nyata atau imaginasi, orang yang sangat disegani dalam suatu budaya. *Rituals* adalah aktivitas kolektif yang dilakukan, bisa jadi seperti ucap salam, respect dengan yang lain, perayaan

sosial dan agama. Value berada pada inti bawah dan menjadi inti budaya. Sistem nilai inilah yang menentukan sesuatu baik atau buruk, jahat atau baik, salah atau benar, jelek atau cantik, natural atau tidak natural, normal atau tidak normal, logis atau tidak logis, dan rasional atau tidak rasional (Hofstede, 1997, p. 8)



Gambar 2.3 Diagram Bawang: Manifestasi dari Budaya pada Tingkat Kedalaman yang Berbeda

Sumber: Hofstede, Geert. (1997).

2.1.2.2 Tingkat Lapisan Budaya

Selain itu Hostede (1997) juga memperkenalkan adanya lapisan kebudayaan yang bertingkat. Berikut ini lapisan tingkatan (*level*) budaya tersebut:

- a. Budaya di level nasional, budaya ini selaras dengan negaranya atau orang yang bermigrasi seumur hidupnya
- b. Budaya di tingkat regional, etnis, agama, dan afiliasi bahasa
- c. Tingkatan jenis kelamin atau gender, selaras dengan seseorang lahir sebagai laki-laki atau perempuan
- d. Tingkatan generasi, misalnya pemisahan generasi kakek, orang tua, dan anaknya.
- e. Tingkatan kelas sosial, selaras dengan kesempatan pendidikan dan dengan profesi atau pekerjaan seseorang

- f. Untuk mereka yang bekerja, terdapat level budaya organisasi atau perusahaan.

Hofstede (1997) menjelaskan “Budaya pada lapisan regional, etnis, dan agama dapat digambarkan/dijelaskan dengan cara yang sama dengan budaya pada level nasional. Secara mendasar antara lapisan kebudayaan ini ditemukan dimensi kebudayaan yang sama” (p.16). Karena penelitian ini hanya berfokus pada kebudayaan nasional dan regional maka pembahasan berikutnya pada teori Hofstede ini akan mengkhususkan pada dimensi kebudayaan yang ada di nasional dan regional.

2.1.2.3 Dimensi Kebudayaan Nasional

Hofstede (1997) pada tahun 1974 melakukan penelitian mengenai *value* atau sistem nilai dari orang-orang dari 50 negara di seluruh dunia. Orang-orang ini adalah para pekerja lokal di kantor-kantor cabang salah satu perusahaan multi nasional yaitu IBM di 50 negara. Dari penelitian yang dilakukan ini, Hofstede dapat menemukan *system value* yang berbeda dari tiap-tiap negara. Analisa data statistik yang dilakukan terhadap jawaban dari pertanyaan *value* yang sama di perusahaan IBM di negara-negara yang berbeda menemukan adanya masalah mendasar yang sama, kelima masalah mendasar yang ditemukan Hofstede (1997) adalah *power distance (from small to large)*, *collectivism vs individualism*, *feminity versus masculinity*, *uncertainty avoidance (from weak to strong)*, dan *short-long term orientation*.

2.1.2.4 Masyarakat Individualis dan Kolektif

Hofstede (1997) menjelaskan masyarakat kolektif adalah kelompok masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Mayoritas masyarakat sosial dunia adalah masyarakat kolektif. Unit kelompok paling kecil dalam kehidupan sosial adalah keluarga yaitu struktur terkecil dalam sosial tempat seseorang dilahirkan. Di dalam masyarakat kolektif “keluarga” tidak hanya

ayah, ibu, saudara yang terikat hubungan darah, namun juga orang-orang yang hidup dekat bersama seperti kakek, nenek, tante, paman, dan lainnya. Hofstede menjelaskan ini dengan istilah *extended family*. Saat anak-anak tumbuh dewasa mereka mulai belajar melihat dirinya sebagai bagian dari “*we group*”, hubungan sosial yang tidak didapatkan dengan pilihan namun identitas yang diberikan secara alamiah. Kelompok sosial terpisahkan oleh kelompok sosial lainnya (*they group*). *We group* ini yang menjadi sumber utama identitas seseorang dan menjadi tempat perlindungan dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya. Oleh karena itu masyarakat kolektif memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap kelompoknya dan menjadi suatu hal yang terburuk apabila seseorang mengkhianati identitas kelompoknya.

Disisi lain ada sekelompok masyarakat yang didalam hidupnya lebih mementingkan kepentingan individunya dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Hofstede (1997) menyebutnya masyarakat Individualis. Biasanya manusia pada masyarakat individualis dilahirkan pada keluarga yang terdiri dari dua orang tua, dan mungkin saudara/saudarinya. Atau mungkin hanya dibesarkan dengan *single parent*. Hofstede (1997) menyebut keluarga jenis seperti ini dengan istilah *nuclear family* (dari bahasa latin nucleus yang artinya inti). Saat bertumbuh anak-anak ini mulai berpikir dirinya sebagai “saya”. Ke-saya-an ini adalah identitas personal yang membedakannya dari identitas diri orang lain. identitas personal tidak dipengaruhi oleh keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tetapi sangat dipengaruhi oleh karakteristik individual. Teman atau sahabat ditentukan berdasarkan kecenderungan personal tidak berdasarkan identitas kelompok. Masyarakat individualis memiliki perspektif terhadap tujuan pendidikan yaitu agar anak-anak mereka dapat mandiri berdiri dengan kaki sendiri, mereka didorong untuk segera mandiri dan meninggalkan rumah orangtuanya secepat mungkin. Hubungan keluarga dengan orang tua mereka cenderung merenggang ketika mereka keluar dari rumah orang tuanya.

2.1.2.5 Mengukur Tingkat Dimensi Kebudayaan Individualisme-Kolektivisme

Hofstede (1997) mendefinisikan dimensi kebudayaan Individualisme dan kolektivisme sebagai berikut:

Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose: everyone is expected to look after himself or herself and his or her immediate family. Collectivism as its opposite pertains to societies in which people from birth onwards are integrated into strong, cohesive ingroups, which throughout people's lifetime continue to protect them in exchange for unquestioning loyalty (p.51)

Hofstede (1997) telah mengukur dimensi kebudayaan kolektivisme dan individualisme ke 50 negara, hasil datanya menunjukkan perbandingan besar nilai individualisme antara negara-negara tersebut. pertanyaan kuesioner yang diajukan untuk mengukur index individualisme mengacu pada pertanyaan dan/atau pernyataan yang berhubungan dengan "work goal". Para partisipan diminta memikirkan sebuah pekerjaan yang ideal, diluar pekerjaan mereka saat ini. Dalam memilih sebuah pekerjaan yang ideal mereka diminta memilih seberapa pentingkah pertanyaan dan/ atau pernyataan yang diberikan. Setiap pernyataan akan terdapat pilihan skala angka 1-5, angka 1 menunjukkan jawaban sangat amat penting dan sebaliknya angka 5 menunjukkan kurang/ tidak penting.

Pernyataan dan pertanyaan yang menjadi parameter individualis adalah terkait dengan personal time yang diperoleh, kebebasan dalam berekspresi, dan tantangan untuk mendapatkan prestasi pribadi dalam pekerjaan, sedangkan parameter kolektif adalah pentingnya learning, kondisi fisik, dan pemberdayaan kemampuan dalam pekerjaan. Penting atau tidaknya parameter-parameter diataslah yang diukur oleh Hofstede untuk mengetahui tingkat individualisme-kolektivisme pada penelitian yang dilakukannya di IBM.

Dari pengukuran yang dilakukan terhadap 50 negara diperoleh *individualism index* (IDV) yang dapat dilihat pada tabel 2.1. Hofstede mengembangkan instrumen penelitian yang dia lakukan sebelumnya. Untuk pengukuran indeks individualisme-kolektivisme Hofstede dan Minkov

(2003) memaparkan pernyataan-pernyataan terkait work goal, yang dijadikan parameter untuk kutub individualis adalah:

- a. Memiliki cukup waktu luang untuk diri sendiri / keluarga Anda
 - b. Mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan
- Sebaliknya untuk kutub kolektivisme:
- c. Memiliki kepastian dibantu rekan kerja saat Anda mendapat masalah
 - d. Memiliki pekerjaan yang dihormati oleh keluarga dan teman-teman Anda

Sangat mudah memahami mengapa menjadikan parameter *work goal: Personal time, freedom, personal challenge, dan enjoyable work* sebagai ukuran untuk karakteristik individualisme, yaitu karena menitikkan pada kemandirian dalam pekerjaan mereka. Hal ini cocok dengan ciri masyarakat individualis. Sebaliknya *work goal: training, physical condition, skill being used, bantuan teman, dan pekerjaan yang mengangkat derajat dan di hormati* dijadikan karakteristik kolektivisme karena menunjukkan ketergantungannya terhadap kelompoknya. (Hofstede, 1997; Hofstede dan Minkov, 2013)

2.1.2.6 Karakteristik Masyarakat Kolektifisme dan Individualisme

Hofstede (1997) menjelaskan karakteristik-karakteristik yang menjadi kunci perbedaan antara masyarakat kolektif dan individualis secara umum, lingkungan rumah/keluarga, sekolah, pekerjaan, kebangsaan, dan bagaimana kolektif dan individualis sebagai ide yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Pada tabel 2.2 dipaparkan karakteristik masyarakat individualisme dan kolektivisme pada norma umum, lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan. Pada tabel 2.3 dipaparkan karakteristik masyarakat individualisme dan kolektivisme pada lingkup politik dan ide.

Tabel 2.1 Index nilai individualisme (IDV) untuk 50 negara dan 3 kawasan

Score rank	Country or Region	IDV score	Score rank	Country or Region	IDV score
1	USA	91	28	Turkey	37
2	Australia	90	29	Uruguay	36
3	Great Britain	89	30	Greece	35
4/5	Canada	80	31	Philippines	32
4/5	Natherlands	80	32	Mexico	30
6	New Zealand	79	33/35	East Africa	27
7	Italy	76	33/35	Yugoslavia	27
8	Belgium	75	33/35	Portugal	27
9	Denmark	74	36	Malaysia	26
10/11	Sweden	71	37	Hong Kong	25
10/11	France	71	38	Chile	23
12	Ireland	70	39/41	West Africa	20
13	Norway	69	39/41	Singapore	20
14	Switzerland	68	39/41	Thailand	20
15	Germany F.R.	67	42	Salvador	19
16	South Africa	65	43	South Korea	18
17	Finland	63	44	Taiwan	17
18	Austria	55	45	Peru	16
19	Israel	54	46	Costa Rica	15
20	Spain	51	47/48	Pakistan	14
21	India	48	47/48	Indonesia	14
22/23	Japan	46	49	Columbia	13
22/23	Argentina	46	50	Venezuela	12
24	Iran	41	51	Panama	11
25	Jamaica	39	52	Equador	8
26/27	Brazil	38	53	Guetamala	6
26/27	Arab Countries	38			

Sumber: Hofstede, Geert H. (1997)

Tabel 2.2 Kunci Perbedaan Antara Masyarakat Kolektivisme dan Individualisme pada Norma Umum, Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Pekerjaan

Collectivist	Individualist
<i>People are born into extended families or other ingroups which continue to protect them in exchange for loyalty</i>	<i>Everyone grows up to look after him/herself and his/her immediate (nuclear) family only</i>
<i>Identity based in the social network to which one belongs</i>	<i>Identity based in the individual</i>
<i>Children learn think in terms of 'we'</i>	<i>Children learn think in terms of 'I'</i>
<i>Harmony should always be maintained and direct confrontation avoided</i>	<i>Speaking one's mind is characteristic of an honest person</i>
<i>High context communication</i>	<i>Low context communication</i>
<i>Trespassing leads to shame and loss of face for self and group</i>	<i>Trespassing leads to guilt and loss of self respect</i>
<i>Purpose of education is learning how to do</i>	<i>Purpose of education is learning how to learn</i>
<i>Diplomas provide entry to higher status groups</i>	<i>Diplomas increase economic worth and/or self respect</i>
<i>Relationship employer-employee is perceived moral terms, like a family link</i>	<i>Relationship employer-employee is a contract supposed to be based on mutual advantage</i>
<i>Hiring and promotion decisions take employees ingroup into account</i>	<i>Hiring and promotion decisions are supposed to be based on skills and rules only</i>
<i>Management is management of groups</i>	<i>Management is management of individuals</i>
<i>Relationship prevails over task</i>	<i>Task prevails over relationship</i>

Sumber: Hofstede, Geert H. (1997)

Tabel 2.3 Kunci Perbedaan Antara Masyarakat Kolektivisme dan Individualisme pada Lingkup Politik dan Ide

Collectivist	Individualist
<i>Collective interest prevail over individual interest</i>	<i>Individual interest prevail over collective interest</i>
<i>Private life is invaded by group(s)</i>	<i>Everyone has a right to privacy</i>
<i>Opinions are predetermined by group membership</i>	<i>Everyone is expected to have private opinion</i>
<i>Laws and right differ by group</i>	<i>Laws and rights are supposed to be the same of all</i>
<i>Low per capita GNP</i>	<i>High per capita GNP</i>
<i>Dominant role of the state in the economic system</i>	<i>Restrained role of the state in the economic system</i>
<i>Economy based on collective interest</i>	<i>Economy based on individual interest</i>
<i>Political power exercised by interest groups</i>	<i>Political power exercised by voters</i>
<i>Press controlled by the state</i>	<i>Press freedom</i>
<i>Imported economic theories largely irrelevant because unable to deal with collective and particularist interest</i>	<i>Native economic theories based on pursuit of individual self interest</i>
<i>Ideologies of equality prevail over</i>	<i>Ideologies of individual freedom</i>
<i>Harmony and consensus in society are ultimate goals</i>	<i>Self actualization by every individual is an ultimate goal</i>

Sumber: Hofstede, Geert H. (1997)

2.1.2.7 *Patrons and Clients in Collectivisme*

Hofstede (1997) menjelaskan dalam budaya kolektivisme akan sangat terkait dengan apa yang disebut dengan *power distance*. *power distance* didefinisikan sebagai bentuk kebudayaan yang terkait dengan gap, jarak, atau ketimpangan kekuasaan atau kekuatan antara beberapa kelompok manusia. Ada ketidak setaraan dalam *society*. Beberapa orang dianggap lebih berkuasa, lebih kuat, lebih dihormati, ataupun lebih pandai. Atau juga bisa dilihat dari aspek ekonomi, status sosial dan lain-lain. Pada bentuk berikutnya akan terbentuk perasaan dominan terhadap kutub lawannya. Misalnya orang yang lebih tua dianggap tidak setara dengan yang anak muda, yang tua memiliki kuasa, pengaruh, dan status lebih tinggi dari anak-anak muda. Atau bisa juga terjadi antara hubungan senior dan junior dalam suatu *society*, ada gap kesetaraan status *social* antara senior dan junior dalam suatu komunitas. Di beberapa *society* hal ini dianggap sesuatu yang baik, dibandingkan sebuah masalah. *Society* yang gap ketidak setaraannya makin tinggi ini disebut masyarakat yang memiliki *power distance* yang tinggi, sebaliknya semakin setara hubungan di dalam komunitas masyarakat maka semakin rendah *power distancenya*.

Lebih lanjut Hofstede (1997) menjelaskan bahwa ada hubungan antara kedua karakter kebudayaan ini. Banyak negara yang memiliki nilai *power distance* yang tinggi, memiliki nilai individualisme yang rendah. Sebaliknya, negara yang semakin besar *power distance*-nya maka negara tersebut semakin besar kolektivisme-nya, dan semakin rendah *power distance* maka negara tersebut semakin individualis.

Hubungan antar individu atau kelompok yang bercirikan ketidaksetaraan status sosial antara orang di dalam suatu kelompok pada masyarakat kolektif dalam istilah lain disebut dengan *patron and client relationship*. Definisi dari hubungan *patron-client* di utarakan oleh Scott (1972) sebagai berikut:

The patron-client relationship is an exchange relationship between roles-may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual or higher status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person lower status (client) who, for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the patron. (p. 66)

2.1.3 Peran Memori Kolektif dalam Konflik antar Kelompok

Maurice Halbwachs memberikan definisi tentang memori kolektif, yaitu sebagai ingatan yang dikonstruksi dan di-rekonstruksi sepanjang waktu, dan sangat berhubungan dekat dengan citra identitas seseorang pada konteks saat ini

Emil Durkheim membedakan memori kedalam dua tipe umum : memori historis dan memori otobiografis. Memori historis adalah memori yang tidak dipelajari melalui pengalaman langsung, tapi melalui catatan-catatan tertulis, artifak-artifak, tugu, dan sebagainya. Sedangkan memori otobiografis adalah memori yang timbul akibat pengalaman langsung oleh individu tersebut.

Menurut M. Schudson, hilangnya ingatan-ingatan detil dan berkurangnya intensitas emosional tentang suatu kejadian di masa lalu dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara memberikan atribut-atribut sebagai pengingat, seperti cerita kepahlawanan, penceritaan berulang mengenai sejarah, penyelenggaraan parade, dapat menimbulkan semangat patriotisme pada generasi belia yang bahkan tidak mengalami masa perjuangan tersebut

Mack (1983) dan Irwin Zarecka (1994) menulis tentang memori sosial dalam kaitannya dengan konflik kekerasan; Mereka menemukan bahwa terdapat kaitan erat antara memori sosial dan proses emosi dan identitas kelompok. Bahwa memori sosial dapat 'diajarkan' sehingga anggota kelompok dapat menarik batas yang sangat jelas antara "kami" dan "mereka" (untuk merujuk kepada 'ingroup' dan 'outgroup' (pen.)). Memori

sosial ini juga dapat meningkatkan kohesi kelompok, menimbulkan degradasi penilaian terhadap kelompok diluar kelompoknya, menanamkan anggapan kejayaan dan idealisasi terhadap kelompoknya, dan menyamakan persepsi para anggota kelompok terhadap rasa memiliki kepada kelompoknya. “Luka” secara sosial yang dirasakan oleh para anggota kelompok dapat menjadi motivasi yang sangat kuat bagi para anggota kelompok dalam mempertahankan harga diri kelompok, sehingga tindak balas dendam yang kasar dianggap sebagai sesuatu yang harus dan wajar untuk dilakukan.

Lebih lanjut Mack (1983) juga menekankan bahwa peran pemimpin politik sangat penting dalam proses ini, yang mana sering terjadi pemimpin politik ini memanipulasi emosi kelompok bahwa mereka adalah korban (*victimization*), dan kelompok luar (*outgroup*) adalah pelaku yang membuat mereka menjadi korban. Luka secara kolektif ini, yang dirasakan oleh seluruh anggota kelompok, akan menyebabkan meroketnya rasa memiliki antar anggota kelompok, dan pada akhirnya akan secara drastis meningkatkan kohesi kelompok secara keseluruhan.

Memori sosial, selain dapat ‘disalah-gunakan’ untuk tujuan dekonstruktif, dapat juga digunakan untuk tujuan konstruktif. Irwin-Zarecka (1994) meneliti tentang adanya dimensi moral dalam memori sosial, dalam hal ini memori sosial dapat dirancang justru untuk dilupakan. Peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman terhadap warga Yahudi adalah contoh dimana memori sosial dirancang justru untuk dilupakan. Aspek moral dari mengingat kejadian ini bagi pemerintah Jerman justru merupakan halangan (*barrier*) bagi tercapainya suatu resolusi konflik. Smith (1996) meneliti hal yang mirip dengan Irwin. Pada penelitian Smith, memori sosial yang spesifik mengenai masa keemasan (*golden age*) dari suatu kelompok dimana pada masa itu terdapat kejayaan, nilai-nilai moral yang tinggi dan aksi kepahlawanan, dapat mempromosikan pembaruan identitas dan re-identifikasi kelompok.

Hal lain yang berpengaruh adalah kekerasan fisik (*physical violence*). Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh satu atau lebih

anggota kelompok akan dirasakan sebagai kekerasan terhadap keseluruhan kelompok. Kekerasan itu tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok yang terlibat secara langsung pada saat konflik terjadi, tapi juga dirasakan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat secara langsung pada saat konflik itu terjadi. Cakupan kekerasan fisik menurut Bar-Tal adalah : tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan fisik sampai mengakibatkan kematian, cakupan emosional yang dirasakan pada saat terjadinya tindak kekerasan itu, rasa kehilangan yang tak tergantikan apabila tindak kekerasan meminta korban jiwa, keinginan untuk melakukan tindakan balas dendam, dan rasionalisasi atau justifikasi pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok seterusnya.

Tindak kekerasan yang dialami kelompok akan meningkatkan keterlibatan emosional antar anggota kelompok. Anggota kelompok akan terlibat secara emosional apabila anggota kelompok ada yang terluka atau meninggal. Tingkatan emosional akan semakin tinggi seiring dengan tingkat kedekatan anggota kelompok lain terhadap anggota kelompok yang menjadi korban. Pada kasus dimana konflik menyebabkan kematian, bahkan pada saat korban tidak secara personal dikenal oleh anggota kelompok lain, keterlibatan emosional yang dihasilkan kepada anggota kelompok lain akan meningkat secara intensif. Walaupun penyerangan dilakukan antara individu terhadap individu, kejadian ini akan dianggap sebagai penyerangan terhadap kelompok, dan kehilangan individu akan dianggap sebagai kehilangan secara kolektif.

Rasa kehilangan ini kemudian memicu terjadinya aksi balas dendam. "Darah dibalas dengan darah" adalah sesuatu hal yang dianggap acuan dalam melakukan aksi balas dendam, bahkan di beberapa masyarakat, dianggap sebagai persyaratan moral. Tindak penyerangan terhadap kelompok dianggap sebagai hal yang memalukan apabila tidak terbalaskan, dan pertumpahan darah anggota kelompok lain adalah hal yang dianggap dapat mengkompensasi hal tersebut. Tindak balas dendam dianggap sebagai tindakan yang patut dilakukan agar anggota kelompok dapat menegakkan kepala di lingkup sosialnya; tindak balas dendam dapat

mengembalikan ego kelompok yang ternoda. Pada akhirnya, hal ini akan meng-eskalasi konflik ke tingkat yang lebih tinggi, dan ingatan akan kekerasan yang dilestarikan akan menjadi pondasi bagi berkembangnya budaya kekerasan di suatu kelompok.

2.1.4 Social Identity Theories

Teori yang dapat membedah konflik kekerasan yang diwarnai oleh isu identitas kelompok/sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Henri Tajfel (1919-1982) dan yang lainnya (Tajfel and Turners, 1979) yaitu *social identity theory* (Sandole, et al, 2011; Demmers, Jolle, 2012). Secara umum Tajfel menjelaskan motif terjadinya konflik karena adanya *needs* dari individu dalam satu kelompok untuk membandingkannya dengan kelompok lain. ada kecenderungan keinginan untuk menjadi terbaik dan teratas tingkat derajatnya. proses terjadinya konflik melalui empat konsep mendasar yaitu *categoritation, social comparison, competition, dan positive distinction*

(1) Kategorisasi (*Categorization*) yaitu proses dasar pembentukan identitas kelompok, pada fase ini persamaan di dalam kelompok akan di kuatkan dan melebih-lebihkan perbedaan dengan kelompok lain. inti dari *social identity theory* adalah ide dari individu untuk mencari dan menemukan kelompok dalam rangka mengurangi ketidakpastian, mendapatkan rasa aman, dan arti positif dalam diri melalui partisipasinya dalam suatu kelompok. Kecenderungan manusia dalam kelompok ini menghasilkan pembentukan *in-group* dan *out-group* (Demmers, Jolle, 2012). Menurut Tajfel (sebagaimana dikutip dalam Demmers, Jolle, 2012), dalam proses kategorisasi seringkali terjadi *stereotype*. Berikut ini kutipan penjelasannya:

Stereotype arise from processes of categorization: they introduce simplicity and order where there is complexity and nearly random variation. They can help us to cope only if fuzzy differences between groups are transmitted into clear ones, or new differences created where non exist. (p. 39)

Sunarto (2004) memaparkan, stereotip erat kaitannya dengan prasangka (*prejudice*): orang yang menganut stereotip mengenai kelompok lain cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut (p.152). Sunarto (2004) mengutip definisi stereotip dari para ahli seperti yang disampaikan oleh Kornblum (1988) yaitu citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Sunarto juga mengutip pernyataan Banton (1967) tentang stereotip yaitu kecenderungan orang untuk mempercayai sesuatu yang bersifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta objektif. Pelabelan citra yang diberikan kepada kelompok lain tersebut mungkin ada benarnya, tetapi karena tidak dilakukan proses pembuktian kebenaran maka citra tersebut tidak sepenuhnya benar. Contoh stereotip misalnya adalah menganggap komunitas muslim sebagai teroris, di Amerika orang latin dan negro dianggap bandal dan pengedar narkoba.

Karena stereotip didasari oleh suatu prasangka maka perlu dipahami mengenai hal ini. Prasangka (*prejudice*) adalah sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Sikap ini dinamakan prasangka karena dugaan yang dianut orang yang berprasangka tidak didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, ataupun bukti yang memadai. (Sunarto, 2004, p. 151)

Proses kategorisasi tereskalasi kedalam fase berikutnya yaitu (2) *Social comparison* yang merupakan proses membandingkan antar kedua kelompok. Fase ini akan menghasilkan jarak antara kedua kelompok. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Tajfel, ia menemukan adanya kecenderungan manusia untuk memaksimalkan perbedaan antara in-group dan out-group mereka. Standard yang digunakan untuk membandingkan tidak jelas dan cenderung relatif, misalnya suatu kelompok dapat menjadi kaya apabila kelompok lain miskin, atau malas. Kelompok in-group maju kalau out-group terbelakang. Kecenderungan komparasi seperti ini melahirkan (3) kompetisi (*competititon*) antar in-group dan out-group (Demmers, Jolle, 2012). Hal ini mempengaruhi bagaimana suatu kelompok

memandang sumberdaya atau kekuasaan. Kelompok-kelompok yang memiliki intensi terhadap hal tersebut cenderung tidak mau berbagi menggunakannya bersama. Namun yang terjadi adalah keinginan untuk menguasai untuk kepentingan kelompok sendiri. biasanya kompetisi seperti ini terjadi antara kelompok yang hidup berdampingan pada teritori yang sama atau dalam komunitas yang sama namun seringkali memiliki perbedaan status misalnya minoritas-mayoritas, kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah, dan lain sebagainya. Fase ini akan menguatkan stereotip, sifat agresif, marah, dan antagonisme (Sandole, et al, 2011). Intensi kompetisi selanjutnya akan berujung pada (4) *Aggression*, fase ini telah berwujud perilaku-prilaku yang menunjukkan bahwa ingroup lebih baik daripada outgroup berupa diskriminasi, dominasi, bahkan agresi kekerasan (Demmers, Jolle, 2012).

2.1.5 Intervensi sosial

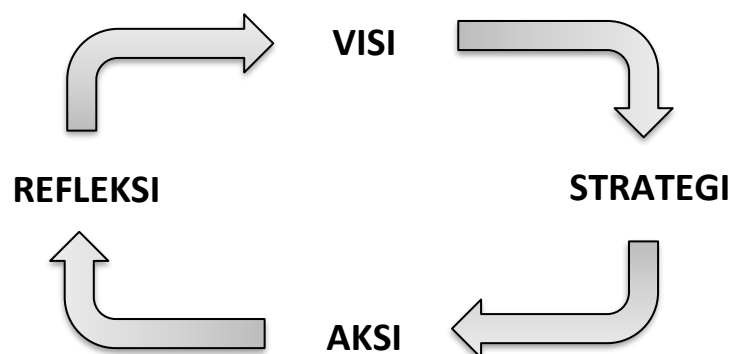
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan intervensi sosial dikarenakan tingginya intensitas kekerasan pada konflik identitas setiap tahunnya. Seringnya terjadi kasus kekerasan antar kelompok ini membuat sebagian kelompok menganggap kekerasan adalah hal yang lumrah terjadi. Terjadi banalisasi atau pengendapan masalah sehingga masalah tersebut seolah-olah sudah biasa dan wajar terjadi. Selain itu belum adanya solusi efektif yang dapat mengurangi intensitas konflik kekerasan di Kota Makassar secara umum dan dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak yang berkepentingan dalam kasus konflik kekerasan ini.

Ichsan Malik mendefinisikan intervensi Sosial (Malik et al., 2009) sebagai serangkaian kegiatan untuk pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak diuntungkan pada suatu wilayah tertentu, secara partisipatif, dengan bertumpu pada kerangka teori dan metodologi psikologi sosial yang tepat guna. Serangkaian kegiatan dimaksudkan sebagai isyarat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan direncanakan bersifat jangka panjang, bertahap, dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa upaya

perubahan nilai-nilai, kebijakan program, distribusi sumber daya, perimbangan kekuatan dan norma-norma budaya.

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah suatu proses sekaligus tujuan yang mengisyaratkan suatu peningkatan kapasitas dan kesadaran kritis pada diri seseorang atau sekelompok orang agar berdaya untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat diri kelompoknya. Serangkaian kegiatan pemberdayaan untuk intervensi sosial yang dilakukan harus bersifat partisipatis, maksudnya adalah sasaran intervensi baik itu individu atau kelompok diposisikan sebagai subjek yang aktif, bukan sekedar sebagai objek intervensi. Sasaran intervensi harus terlibat sepenuhnya dalam pembuatan keputusan untuk intervensi, penerapan keputusan, menikmati hasil intervensi, dan melakukan evaluasi terhadap intervensi yang dilaksanakan.

Kerangka teori dan metodologi psikologi sosial yang tepat guna, mengisyaratkan dalam penggunaan teori psikologi sosial untuk intervensi tetap merujuk pada norma korespondensi, koherensi, dan norma pragmatik. Penekanan diberikan pada norma ketiga yaitu sejauh mana teori yang digunakan berdampak untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.



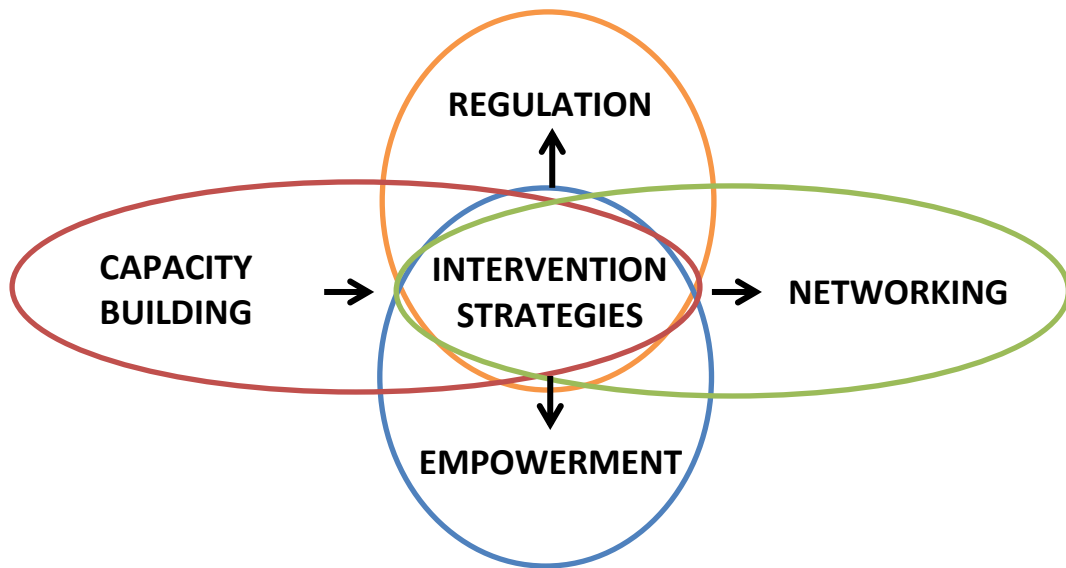
Gambar 2.4 Kerangka Intervensi Sosial

Sumber: Malik, Ichsan. (2009).

2.1.5.1 Prinsip Dasar Intervensi

Intervensi adalah suatu proses dan sekaligus sebagai tujuan sehingga proses-proses harus sesuai dalam rangka pencapaian tujuan. (Malik, Ichsan., 2009). Intervensi juga didefinisikan sebagai strategi yang direncanakan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah misalnya mengubah perilaku, mengurangi resiko, atau meningkatkan hasil (Fraser, Richman, Galinsky, dan Day., 2009).

Malik (2009) memaparkan terdapat 4 unsur dasar intervensi yaitu Visi – Strategi – Aksi – Refleksi (V.S.A.R). kerangka intervensi sosial dapat dilihat pada gambar 2.4. Visi adalah suatu pandangan ke depan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai melalui serangkaian proses kegiatan intervensi. Strategi merupakan suatu peta jalan untuk mencapai tujuan intervensi, oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mana di dalamnya terdapat taktik-taktik yaitu teori-teori yang relevan dan tepat guna untuk digunakan. Ichsan malik (2009) memaparkan mengenai empat arah dalam strategi intervensi yaitu: (1) strategi ke atas, terkait dengan analisis terhadap kebijakan-kebijakan; (2) strategi ke bawah, berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*) seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan penataan lingkungan; (3) strategi ke samping, berkaitan dengan *networking* seperti pengorganisasian kelompok kecil dan pembangunan jaringan sosial. (4) Strategi ke dalam, berkaitan dengan *capacity building* seperti pelatihan motivasi, komunikasi, advokasi, dan pengembangan media pendidikan masyarakat. Gambaran skema arah strategi intervensi dapat dilihat pada gambar 2.5.



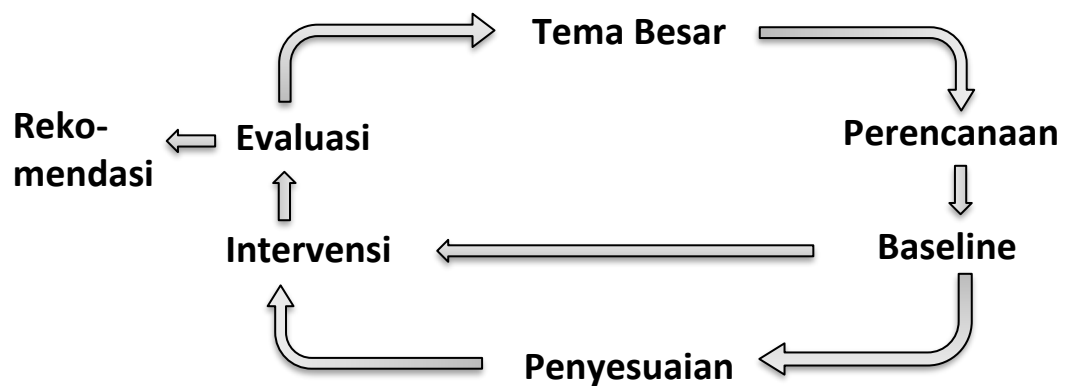
Gambar 2.5 Skema Strategi Intervensi

Sumber: Malik, Ichsan. (2009)

Malik (2009) memaparkan wujud dari aksi adalah serangkaian kegiatan yang spesifik dan terukur untuk memecahkan masalah spesifik sesuai peta strategi, antara lain analisis kebijakan, peningkatan ekonomi, atau pengorganisasian kelompok kecil. Aksi pada intervensi tidak bersifat individual, namun melebar kepada aksi di dalam kelompok kecil (meso), atau aksi kepada komunitas yang lebih luas (makro). Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi dasar bagi kegiatan intervensi. Malik (2009) menjelaskan refleksi sebagai tahap evaluasi atau penilaian yang dilakukan terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Refleksi atau evaluasi dilaksanakan terhadap setiap langkah kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan perencanaan maupun terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.1.5.2 Langkah Kegiatan Intervensi

Malik (2009) menjelaskan, kegiatan intervensi pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang membentuk satu siklus yang utuh, saling terkait, dan ada saling ketergantungan. Secara visual, seluruh langkah kegiatan intervensi dapat dilihat pada gambar 2.6



Gambar 2.6 Siklus Kegiatan Intervensi

Sumber: Malik, Ichsan. (2009)

Tahapan pertama kegiatan intervensi dilakukan dengan menentukan tema besar yang menjadi prioritas. Tahapan kedua adalah tahap perencanaan, tahapan ini menghasilkan peta yang menjelaskan tiga unsur utama yang ada dalam intervensi dan merupakan faktor penentu keberhasilan dari intervensi yaitu pemetaan aktor, pemetaan masalah, dan pemetaan potensi wilayah. Langkah ketiga adalah *baseline* yaitu langkah pengujian seluruh konsep yang sudah dirumuskan termasuk didalamnya variabel-variabelnya. Langkah keempat adalah pelaksanaan intervensi yang mencakup tiga kegiatan yaitu kegiatan inti/utama, pendukung dan kegiatan dokumentasi. Langkah kelima dan terakhir adalah evaluasi yang mencakup evaluasi terhadap dampak pelaksanaan kegiatan dan dinamika kelompok yang terjadi pada saat pelaksanaan intervensi

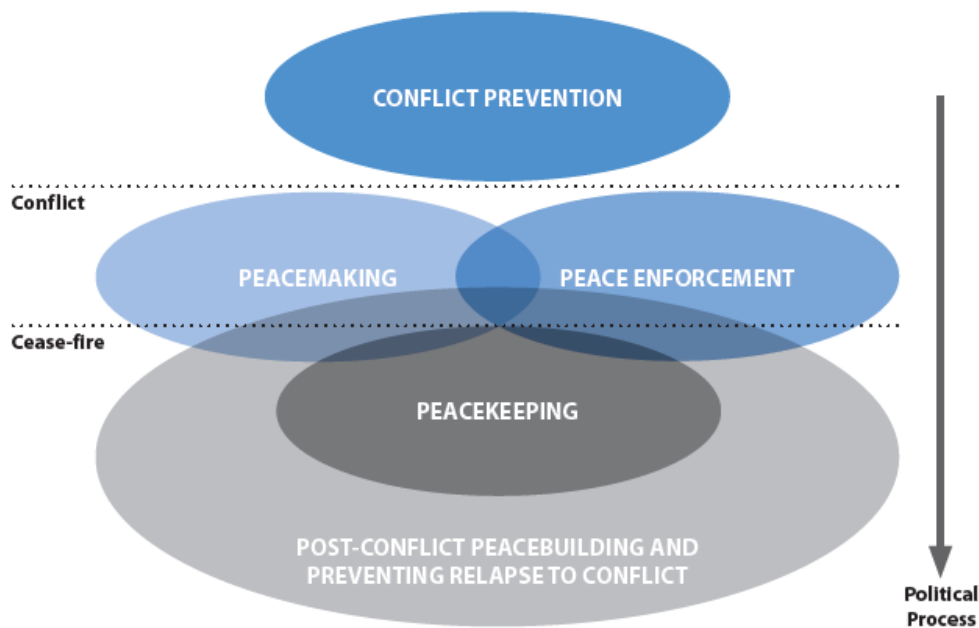
2.1.6 Spektrum misi perdamaian dan aktifitas pertahanan *United Nation*

Peace keeping adalah salah satu dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh United Nation dan beberapa organisasi internasional dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian dunia. (*United Nation, Departement of peacekeeping Operations*, 2010, p.17) dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai kaitan dan perbedaan terkait misi-misi

perdamaian yang dilakukan *United Nation* yaitu *conflict prevention, peace making, peace enforcemen, peace keeping, dan peace building*. Hal ini penting diketahui karena spektrum misi perdamaian UN inilah yang akan digunakan untuk merumuskan strategi intervensi fenomena konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar.

Spektrum Misi perdamaian yang pertama adalah *Conflict Prevention* meliputi penerapan skala diplomasi dan struktural untuk menjaga ketegangan dan perselisihan dalam wilayah maupun antar wilayah menuju konflik yang lebih besar. Idealnya, hal tersebut sudah dibangun secara struktural dalam bentuk peringatan dini secara struktural, kumpulan informasi dan analisa secara hati-hati mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Kegiatan pencegahan konflik bisa meliputi penggunaan Sekjen sebagai “good offices’ pencegahan penyebaran atau pengukuran tingkat kepercayaan diri. (*United Nation, Departement of peacekeeping Operations, 2010, p.17*)

Yang berikutnya adalah *Peace Making* secara umum termasuk dalam pengukuran untuk memetakan konflik yang berjalan dan biasanya melibatkan aksi-aksi diplomatic untuk membawa pihak-pihak yang sedang bertikai dalam semua perundingan atau kesepakatan. Sekjen PBB, atas permohonan dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum atau dari inisiatif sendiri, dapat menggunakan “good office” untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Pembawa perdamaian juga bisa menjadi utusan, pemerintah, kelompok negara bagian, organisasi tingkat regional atau PBB. Penjaga perdamaian juga bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau perorangan secara independen. (*United Nation, Departement of peacekeeping Operations, 2010, p.18*)



Gambar 2.7 Spektrum misi perdamaian *United Nation*

Sumber: (*United Nation, Departement of peacekeeping Operations, 2010, p.19*)

Peace Keeping adalah teknik yang dirancang untuk melestarikan perdamaian, namun dangat rentan, di mana pertempuran telah dihentikan, dan untuk membantu menerapkan kesepakatan yang dicapai oleh penjaga perdamaian. Selama bertahun-tahun, penjaga perdamaian berevolusi mengembangkan model militer utama mulai dari gencatan senjata, pemisahan kekuatan setelah perang antar negara, menggabungkan model yang kompleks dengan banyak elemen seperti - militer, polisi dan sipil - bekerja sama untuk membantu meletakkan fondasi untuk perdamaian yang berkelanjutan. (*United Nation, Departement of peacekeeping Operations, 2010, p.18*)

Peace enforcement (*United Nation, Departement of peacekeeping Operations, 2010, p.18*) melibatkan penerapan dengan adanya otorisasi Dewan Keamanan, serangkaian tindakan pemaksaan, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan bersenjata yang terjadi antara kedua belah pihak. Dalam fase misi ini UN bisa melakukan serangan bersenjata kepada satu kelompok tertentu yang tidak menghargai

Peace Building (United Nation, Departement of peacekeeping Operations, 2010, p.18) merupakan fase misi perdamaian yang melibatkan serangkaian tindakan, yang ditargetkan untuk mengurangi risiko terjadi lagi konflik, dan meletakkan dasar untuk perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. *Peace building* adalah proses jangka panjang yang kompleks dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Tolak ukur *Peace building* yaitu menjabarkan isu-isu pokok yang berimbas kepada masyarakat dan Negara, dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas Negara dalam membawa fungsinya dan kekuasaannya secara efektif.

Spektrum misi perdamaian UN inilah yang akan disederhanakan untuk konteks konflik kekerasan antar kelompok di Kota Makassar dan digunakan untuk merumuskan strategi intervensi sosial dari fenomena konflik tersebut.

2.1.7 Model analisis laporan latar belakang konflik

Untuk memahami akar konflik dan faktor penggerak dari fenomena konflik kekerasan antar kelompok di Kota Makassar maka dibutuhkan *framework* dan *tools* yang tepat dan relevan. Ada tiga *tools* yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menyusun latar belakang konflik yaitu dengan menggunakan *push & pull factor*, melakukan analisis SAT (*structural, akselerator, dan trigger*), dan melakukan analisa sekuritisasi (Titian perdamaian, 2005)

2.1.7.1 Model Analisis *Push & Pull Factor*

Push & pull factor (Slachmui-jlider, L, 2017) adalah adalah salah satu *tools* dan *framework* yang kerap kali digunakan untuk memahami bagaimana terjadinya *violent extrimisme*. Chomerus, Taraboulsi, dan Sandhar (2017) menyatakan saat ini para praktisi dan peneliti menggunakan tools ini mengkategorisasikan faktor-faktor penggerak terjadinya *violent extrimism* kedalam faktor pendorong dan penarik. Pengkategorisasian faktor penggerak ini memiliki tantangan yaitu kompleks

dan rumitnya pemisahan kedua faktor ini. Seringkali terjadi keterkaitan ataupun kesalahan dalam mengkategorisasi kedua faktor ini.

Secara umum *push factor* adalah kondisi atau situasi yang berdampak pada rasa frustrasi, termarginalisasi, dan ketidakberdayaan yang mendorong seseorang untuk mencari solusi atau jalan keluarnya, termasuk misalnya masuk kedalam kelompok *violent extrimisme* (Slachmui-jluder, L, 2017, p.8). Chomerus et al (2017) mendeskripsikan *push factor* sebagai keterhubungan situasi individu yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi, sebagaimana juga faktor pribadi. Contoh *push factor* adalah tingginya tingkat marginalisasi dan framentasi sosial di masyarakat, buruknya kinerja pemerintah, represi atau keekrasan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, korupsi yang mengakar dan faktor ketidakadilan hukum (USAID, 2011, p.3).

Pull Factor (Slachmui-jluder, 2017 dan USAID, 2011) adalah istilah yang menggambarkan suatu hal yang berpotensi untuk menarik seseorang tertarik untuk melakukan perbuatan tertentu. Dalam konteks perilaku *violent extrimisme* contoh pull factornya adalah rasa kekerabatan, kepahlawanan, petualangan, keuntungan ekonomi seperti akses terhadap sumberdaya material, penghargaan pribadi atau eksistensi diri seperti keinginan untuk mendapatkan status sosial, rasa hormat dari temannya, keinginan untuk menciptakan sejarah seolah berhasil melepaskan diri mereka dari diskriminasi sehingga mendapatkan kemuliaan dan ketenaran..

Memetakan push dan pull factor pada fenomena konflik kekerasan dapat membantu dalam memahami faktor-faktor penggerak terjadinya fenomena tersebut. Hal ini juga dapat membantu dalam menganalisis pentingnya faktor sosioekonomi, politik lokal, narasi identitas, peran media, dan pola rekrutmen (Slachmui-jluder, L, 2017). Frame work ini yang akan digunakan untuk memahami fenomena konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Makassar

2.1.7.2 Model Analisis Faktor *Structural*, *Accelerator*, dan *Trigger* (SAT)

Komponen SAT terdiri dari tiga faktor yaitu struktural, akselerator dan *trigger*. Komponen ini dipahami sebagai fakta objektif yang dianggap mempengaruhi dinamika (de-) eskalasi konflik (titian perdamaian, 2005).

Malik (2008) menjelaskan *Structural factors* (S) adalah faktor-faktor struktural atau latar belakang yang menciptakan prakondisi konflik sosial. Karakter dari indikator struktural adalah indikator bersifat umum, mendasar, menggambarkan *structural*, *deep rooted*, serta latar belakang prakondisi yang memungkinkan terjadinya konflik (Malik, 2008).

Akselerator (A) merupakan kejadian-kejadian di luar parameter-parameter model atau tidak berhubungan langsung dengan indikator-indikator penyebab konflik, akan tetapi bisa meningkatkan secara cepat eskalasi atau de-eskalasi konflik. Beberapa contoh dari faktor akselerator adalah: kebijakan pemerintah yang diskriminatif, konflik bersenjata/kekerasan antar kelompok, peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok, peningkatan ukuran dan kohesi kelompok vis a vis kelompok lainnya, peningkatan teknik-teknik kekerasan sebagai instrumen konflik, peningkatan bentuk-bentuk agresivitas, dan meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap integritas hidup manusia.

Trigger, biasa disebut pemicu adalah kejadian yg menjadi alasan terjadinya konflik. Mis: pertengkaran antar supir, pemuda bertikai akibat mabuk atau judi, pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik. Faktor-faktor SAT dalam suatu konflik ibarat sebuah fenomena kebakaran besar di padang rumput disebabkan krn adanya rumput kering (struktural) sepercit api (*trigger*) dan angin yang bertiup kencang (akselerator).

2.1.7.3 Model analisis sekuritisasi

Malik (2008) menjelaskan Sekuritisasi adalah eskalasi konflik yang terjadi karena adanya aktor yang melihat situasi SAT dalam ancaman eksistensial, sehingga harus direspon dengan cara yang abnormal, melalui

kekerasan dan disetujui oleh kelompoknya. Sebaliknya de-sekuritisasi adalah ketika de-eskalasi konflik terjadi, aktor utama tidak melihat SAT sebagai ancaman eksistensial. Sehingga tidak perlu direpson dengan cara abnormal, melalui kekerasan serta disetujui oleh kelompoknya

Malik (2008) menjelaskan analisis terhadap sekuritisasi dilakukan dengan melihat lima komponen yaitu:

- a. *Securitizing actor* (SA), merupakan aktor utama yang bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial
- b. Ancaman keamanan eksistensial dianggap dipahami sebagai kondisi yang dianggap membahayakan identitas dan survival dari individu atau kelompok
- c. *Referent object* (RO) adalah kelompok atau kumpulan orang yang dianggap oleh SA sebagai rentan terhadap ancaman eksistensial
- d. *Functional actor* (FA) adalah aktor yang mempengaruhi hubungan SA dan RO, misalnya media massa
- e. *Logic of threat* sebagai komponen terakhir dari sekuritisasi yang mengandung speech act dari SA mengenai ancaman eksistensial yang sedang mengancam RO.

2.1.8 Community Resilience sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional

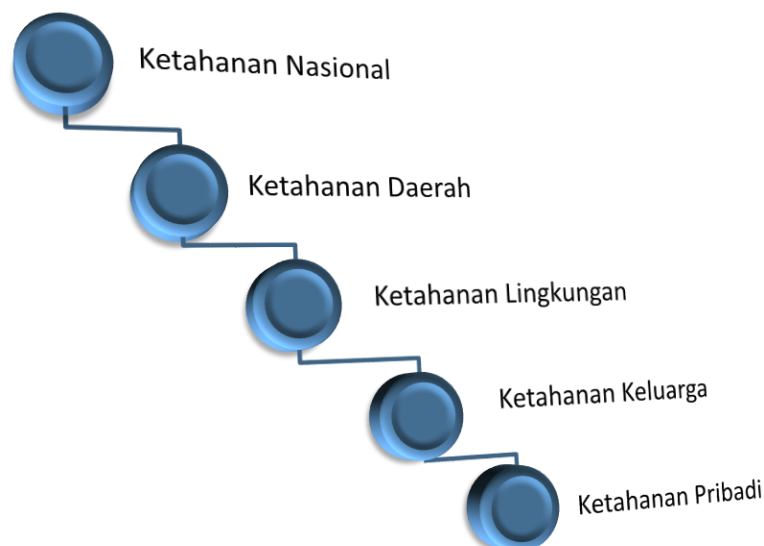
Secara mendasar *resilience* atau ketahanan dapat didefinisikan sebagai adaptasi positif yang dilakukan oleh subjek untuk tahan terhadap ujian, bangkit dari masalah, krisis, konflik, bencana, dan/atau *traumatic event* yang dialami (Hermman, et al, 2011; Nuwayhid, 2011). Terdapat *layer/lapisan* tingkatan dalam membahas *resilience* yaitu diri sebagai resiliensi individu, keluarga, lingkungan masyarakat sosial, bangsa dan negara. (Hermman, et al, 2011; Nuwayhid, 2011; Soedarsono, 1997).

Di Indonesia *resilience* di *level*/bangsa dan negara biasanya disebut dengan istilah ketahanan nasional. Soedarsono (1997) menjelaskan “ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional, serta untuk mengelakkan dan

mengatasi secara efektif segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul, baik dalam maupun luar baik yang bersifat fisik - material maupun yang bersifat mental – spritual”. Lebih lanjut ia menguip defenisi Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lemhanas yaitu sebagai berikut:

Kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan potensi dan kekuatan nasional yang dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu atau membahayakan integritas nasional, identitas nasional, keberlangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan serta cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia

Soedarsono (1997) memaparkan tumpuan dari lahirnya ketahanan nasional adalah ketahanan daerah, lingkungan, keluarga, dan pribadi. Ilustrasi tumpuan ketahanan nasional tersebut dapat dilihat pada gambar 2.8



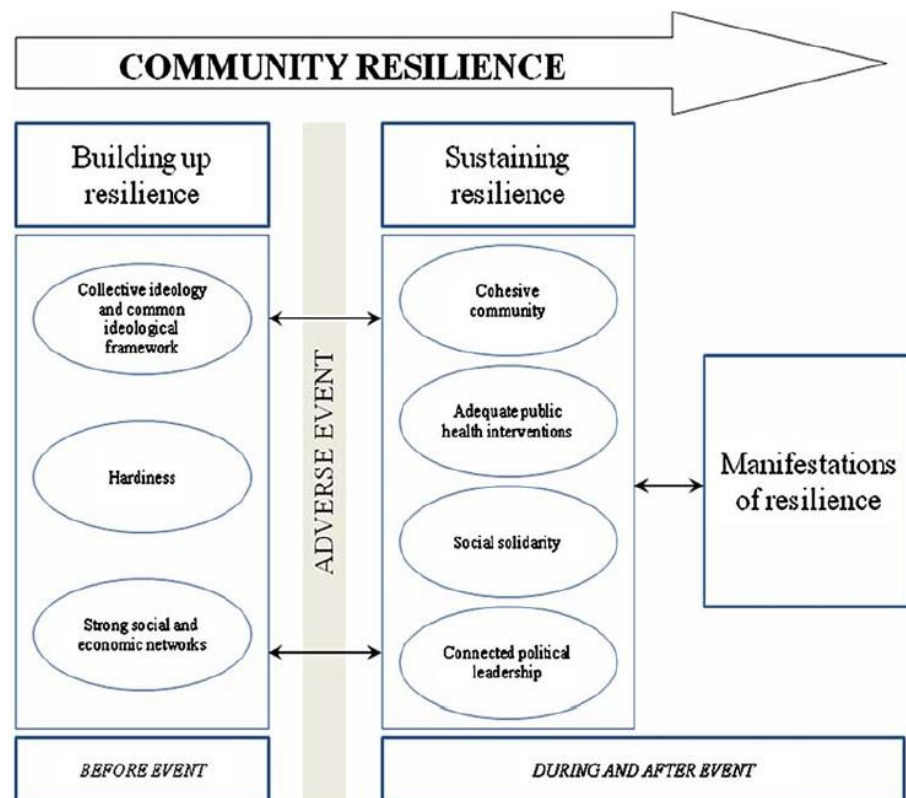
Gambar 2.8 Tumpuan Ketahanan Nasional

Sumber: Soedarsono (1997)

Ketahanan masyarakat merupakan suatu proses di mana faktor-faktor sosial, politik dan budaya berinteraksi saat berhadapan dengan

kondisi yang tidak diinginkan untuk membentuk masyarakat yang kompak bersatu (Nurwayhid, 2011). Setiap tingkatan resiliensi saling mempengaruhi tingkatan lainnya, oleh karena itu untuk membangun ketahanan nasional yang kuat harus menumpu pada ketahanan masyarakat yang kuat.

(Nurwayhid, 2011) memaparkan ketahanan masyarakat adalah proses dari waktu ke waktu yang muncul dari sebuah " rasa identitas kolektif", pengalaman sebelumnya terhadap *adverse event*, dan jaringan dukungan sosial. ia melanjutkan pemaparannya, Ketahanan masyarakat itu akan sustain apabila terdapat : kekompakan masyarakat, bantuan kesehatan masyarakat yang memadai, solidaritas sosial, jaringan kepemimpinan politik.



Gambar 2.9 Model untuk Ketahanan Masyarakat

Sumber: Soedarsono (1997)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian intervensi sosial terhadap konflik kekerasan antar kelompok di Makassar akan dipaparkan pada bagian ini dengan tujuan untuk dapat membantu memahami topik penelitian serta menjadi komparasi/pembanding mengenai perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

2.2.1 Analisis Kultural Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar

Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis kultural politik kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Dilatarbelakangi oleh Fenomena kekerasan mahasiswa di Makassar. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam bagaimana konstruksi kultural membingkai kekerasan hingga terbentuk pola bahwa kultur yang mengandung muatan kekerasan menjadi penyebab munculnya kekerasan sekaligus kekerasan itu sendiri semakin mengkultur di kalangan mahasiswa.

Penelusuran dan analisis yang dilakukan oleh Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi (2011) pada akhirnya sampai pada temuan dan simpulan sebagai berikut:

Faktor kultur memang menjadi salah satu variabel yang memicu muncul dan terpeliharanya kekerasan. Kultur yang maskulin, superior dan cenderung eksklusif, ditambah dengan reproduksi secara terus menerus cerita-cerita, mitos-mitos, hingga sentimen-sentimen dan karakter mental yang menempatkan diri lebih unggul dibanding yang lain secara langsung maupun tidak langsung telah mengkonstruksi alam (bawah) kesadaran yang dalam taraf tertentu membenarkan nalar kekerasan di kalangan mahasiswa

2.2.2 Anatomi Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar

Kacung Marjian dan Hari Fitrianto (2013) mengangkat penelitian dengan judul "Anatomi Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap siklus kekerasan oleh

mahasiswa dengan melacak akar kekerasan dan menggambarkan anatomi kekerasan mahasiswa di Makassar. Pemahaman terhadap anatomi kekerasan mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam memutus mata rantai kekerasan mahasiswa. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan adalah tindakan penegasan identitas mahasiswa. Sumber referensi pada kekerasan aksi mahasiswa berkaitan dengan anggapan bahwa mahasiswa adalah *agents of changes* dan memiliki tanggung jawab sosial dan politik untuk mengawal kondisi negara.

Hal yang menarik yang ditemukan dan dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marjjan dan Fitrianto (2013) adalah penelitian ini menghasilkan pandangan bahwa identitas kolektif menjadi salah satu sumber terjadinya konflik kekerasan mahasiswa. sebagaimana dikutip pada pernyataan berikut “Pada kekerasan mahasiswa yang menjadi sumber referensi adalah identitas kolektif mahasiswa. Identitas kolektif ini berupa identitas jurusan, fakultas, dan universitas, bahkan beberapa kasus identitas etnis dan kesukuan menjadi identitas kolektif yang menyatukan mereka” (p.24).

Marjjan dan Fitrianto (2013) memaparkan bagaimana proses identitas kolektif terbentuk, berikut ini penjelasannya:

Identitas kolektif ini terbentuk melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kolektif dari senior kepada junior (mahasiswa baru). Sosialisasi dan internalisasi tersebut biasa dilakukan ketika acara penyambut-han mahasiswa baru yang berupa ospek di level universitas dan fakultas, maupun malam keakaraban di level jurusan. Kegiatan ospek menjadi kegiatan yang ditujukan untuk menegaskan identitas “we”, sehingga target dari kegiatan tersebut adalah munculnya *in group feeling* yang kuat bahkan melahirkan fanatisme kelompok. Karena itu ospek yang dilakukan tiap fakultas memiliki seremoni atau ritual yang berbeda-beda, tetapi memiliki pesan yang sama untuk disam-paikan ke juniornya yakni mitos kebesaran fakultasnya dibanding fakultas lain (p. 25)

Marjjan dan Fitrianto (2013) menjelaskan karena faktor identitas kelompok inilah yang menyebabkan mudahnya kekerasan mahasiswa terjadi hanya karena masalah kecil terjadi.

Pilihan identitas kelompok yang sangat kuat ini secara langsung mempertegas *we* dan *others*. Segregasi kelompok menjadi saham penting terjadinya kekerasan mahasiswa. Segregasi ini pula yang mengakibatkan mudahnya mahasiswa baik antar jurusan, fakultas, dan universitas untuk saling berhadap-hadapan. Hanya dengan *trigger* (pemicu) konflik yang kecil saja maka kekerasan mahasiswa akan pecah (p. 25)

2.2.3 Kekerasan Kolektif di Perkotaan

Penelitian yang dilakukan Sayful (2015) dilatarbelakangi oleh fenomena perkelahian antar kelompok di Kota Makassar yang cukup intens pada beberapa titik di Kota Makassar. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada fenomena konflik antar kelompok antara warga Pampang dan warga Sukaria. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran pemaknaan maskulinitas yang terwujud dalam pola kekerasan kelompok, serta menganalisis upaya resolusi terkait konstruksi dan maskulinitas antara warga Pampang dan warga Sukaria di Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball*.

Hasil penelitian menunjukkan pola pola kekerasan kolektif antara Pampang dan Sukaria, serta motif-motif terjadinya kekerasan kelompok. Klasifikasi kekerasan kolektif antara Kelompok Pampang dan Kelompok Sukaria terdiri dari kekerasan terbuka dan kekerasan tertutup. Baik kekerasan terbuka maupun kekerasan tertutup dapat bersifat defensif maupun agresif.

Sayful (2015) memaparkan proses terjadinya konflik dan peran konstruksi maskulinitas sebagai berikut:

Kekerasan diawali konflik perebutan lahan parkir, lalu mengalami momen koordinasi massa yang tercipta melalui proses relasi patronase dan pembentukan orang-orang kuat lokal. Kondisi demikian selanjutnya mengarah kepada terciptanya kekerasan budaya yang terdiri dari sumber struktural yang berasal dari kelas perantara dan sumber kultural berupa penyalah artian nilai siri' na pacce. Konstruksi maskulinitas terdiri atas pemahaman laki-laki harus melakukan kekerasan jika menyangkut siri' na pacce. Pola asuh orang tua yang cenderung mengamini perkelahian laki-laki yang disebabkan oleh perempuan. Adapun representasi maskulinitas disimbolkan oleh empat hal, yaitu badik, busur panah, tatto' dan ballo'.

Sayful (2015) memaparkan bentuk resolusi konflik yang direkomendasikan untuk fenomena konflik yang terjadi adalah

Resolusi konflik di kedua wilayah ini terdiri dari upaya pendekatan budaya dilakukan dengan cara *mouth to mouth* mengenai penyalahartian nilai budaya *siri'* dan *pacce* dan pernikahan antara laki-laki preman Kelompok Sukaria dengan wanita dari Wilayah Pampang ataupun sebaliknya. Selain itu, upaya pendekatan kelembagaan dilakukan atas kesadaran masyarakat sendiri, utamanya tokoh pemuda di masing-masing kelompok dengan membentuk organisasi pecinta alam yang para anggotanya didominasi oleh remaja yang terbiasa ikut tawuran. Organisasi pecinta alam dari Wilayah Sukaria bernama Repepals, sementara dari Wilayah Pampang bernama Skala-X. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah menghadirkan suasana lingkungan baru dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian. (p. 205)

2.2.4 Rekonsiliasi Akar Rumput dan Kekitaan

Ichsan Malik (2012) melakukan studi penelitian terhadap proses terbentuknya *we-ness* atau kekitaan pada rekonsiliasi akar rumput yang dilakukan oleh gerakan Baku Bae. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik berdarah yang menitik beratkan pada isu pertikaian antar identitas agama di Maluku pada tahun 1999-2003. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan *grounded theory approach*. Data dikumpulkan dari tujuh belas korban dan juga sebagai *perpetratos*.

Konflik yang terjadi di Maluku adalah konflik identitas, maka rekonsiliasinya adalah mengintegrasika kembali identitas yang terbelah, dan wujud dari integritas itu adalah kekitaan. Komponen utama dari kekitaan adalah: komponen ingatan kebersamaan masa lalu dari korban, komponen harapan korban, komponen rasa percaya antar korban, komponen empati antar korban, komponen identitas bersama dari korban, dan komponen peran fasilitator. Penelitian yang dilakukan Ichsan Malik menganalisis dinamika komponen-komponen ini sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang dapat menggambarkan kekitaan.

Ada dua kelompok aktor yang berperan dalam mewujudkan kekitaan di akar rumput yaitu korban dan fasilitator (Malik, 2012). Pada korban melekat keenam komponen kekitaan sedangkan pada fasilitator

hanya melekat dua komponen yaitu komponen rasa percaya dan empati. Yang membantu korban untuk melampaui kenangan pahit di masa lalu adalah komponen ingatan kebersamaan masa lalu yang menggerakkan komponen harapan. Dengan meresapnya semangat Pela Gandong sedikit demi sedikit para korban dapat menatap masa depan.

Komponen rasa percaya akan tumbuh ketika hilangnya sedikit demi sedikit prasangka antar kelompok, tidak adanya kelompok yang mendominasi, dan diakuinya identitas setiap kelompok, dilakukannya kegiatan bersama, serta digunakannya kesamaan kultural dan bahasa selama interaksi (Malik, 2012). Rasa percaya yang tumbuh akan menumbuhkan komponen rasa empati diantara kelompok-kelompok. Puncaknya adalah lahir dan tumbuhnya komponen identitas bersama atau dalam bahasa lokal Maluku disebut “torang bersaudara”. Identitas bersama ini meruntuhkan sekat-sekat dan bersatu atas kesamaan pengalaman sebagai korban dari konflik Maluku. Setiap kelompok terikat dalam persaudaraan sebagai seorang Maluku (Malik, 2012)

Di sisi lainnya terdapat fasilitator yang menjadi penengah antara kelompok-kelompok yang berkonflik dengan identitas agama. Untuk melakukan hal ini mutlak dibutuhkan komponen rasa percaya, komponen ini tumbuh perlahan melalui aksi-aksi nyata usaha pembangunan perdamaian di Maluku yang melibatkan pihak korban dan pelaku. Kepercayaan dari korban atau sebaliknya akan menghasilkan komponen empati.

Hasil penelitian ini menemukan ada tiga bentuk kekitaan dari rekonsiliasi akar rumput yaitu kekitaan palsu, semu, dan nyata (Malik, 2012). Menurut Malik (2012):

Kekitaan nyata terwujud apabila enam komponen memberikan kontribusi yang positif artinya ingatan kebersamaan masa lalu didasari sepenuhnya oleh korban, antar kelompok korban, dan munculnya empati dalam bentuk perasaan senasib sepenanggungan dari kelompok korban, identitas bersama sebagai “torang bersaudara”, serta fasilitator yang dipercaya oleh kedua belah pihak dan memiliki empati (p. 48)

Rekonsiliasi akar rumput yang dilakukan oleh gerakan Baku Bae selama tiga tahun dengan melibatkan korban dan pelaku konflik serta fasilitator telah dapat mewujudkan kekitaan yang nyata di Maluku.

2.2.5 Perbandingan Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka kita dapat melihat perbandingan antara masing-masing penelitian. Gambaran perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. terdapat tiga penelitian yang mengangkat masalah topik konflik identitas di Makassar dengan rincian dua penelitian membahas mahasiswa sebagai subjek penelitian dan yang satu lagi masyarakat lokasi konflik menjadi subjek penelitian. Satu penelitian lagi tidak membahas tentang konflik di Makassar tetapi mengambil topik tentang konflik identitas yang terjadi di Maluku dan membahas mengenai komponen kekitaan (*we-ness*) yang mendukung rekonsiliasi konflik di akar rumput pada konflik identitas di Maluku

Perbedaan mendasar penelitian yang peneliti lakukan dengan ketiga penelitian terdahulu adalah berdasarkan dasar memandang fenomena konflik kekerasan di Kota Makassar. Peneliti menggunakan budaya masyarakat kolektivisme menjadi modal sosial yang ingin dibuktikan dan dilihat pengaruhnya terhadap konflik kekerasan kolektif. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan pola konflik kekerasan kolektif dan menganalisis strategi intervensi yang tepat untuk melakukan perubahan.

Tabel 2.4 Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi (2011)	Analisis Kultural Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar	Kualitatif	Faktor kultur menjadi salah satu variabel yang memicu muncul dan terpeliharanya kekerasan. Kultur yang maskulin, superior dan cenderung eksklusif
2.	Kacung Marjian dan Hari Fitrianto (2013)	Anatomi kekerasan mahasiswa di Kota Makassar	Kualitatif	kekerasan adalah tindakan penegasan identitas mahasiswa. Sumber referensi pada kekerasan aksi maha-siswa berkaitan dengan anggapan bahwa mahasiswa adalah <i>agents of changes</i> dan memiliki tanggung jawab sosial dan politik untuk mengawal kondisi negara.
3	M. Sayful (2015)	Kekerasan Kolektif di Perkotaan	Kualitatif	Pola-pola kekerasan kolektif antara warga Pampang dan Sukaria, serta motif-motif terjadinya

				kekerasan kelompok
4	Ichsan Malik (2012)	Rekonsiliasi akar rumput dan kekitaan: Peran memori, harapan, empati, kepercayaan, identitas baru, dan fasilitator dalam rekonsiliasi konflik	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan ada tiga bentuk kekitaan dari rekonsiliasi akar rumput yaitu kekitaan palsu, semu, dan nyata. Rekonsiliasi akar rumput yang dilakukan oleh gerakan Baku Bae selama tiga tahun dengan melibatkan korban dan pelaku konflik serta fasilitator telah dapat mewujudkan kekitaan yang nyata di Maluku

Sumber: Hasil Olahan Penulis dari berbagai sumber

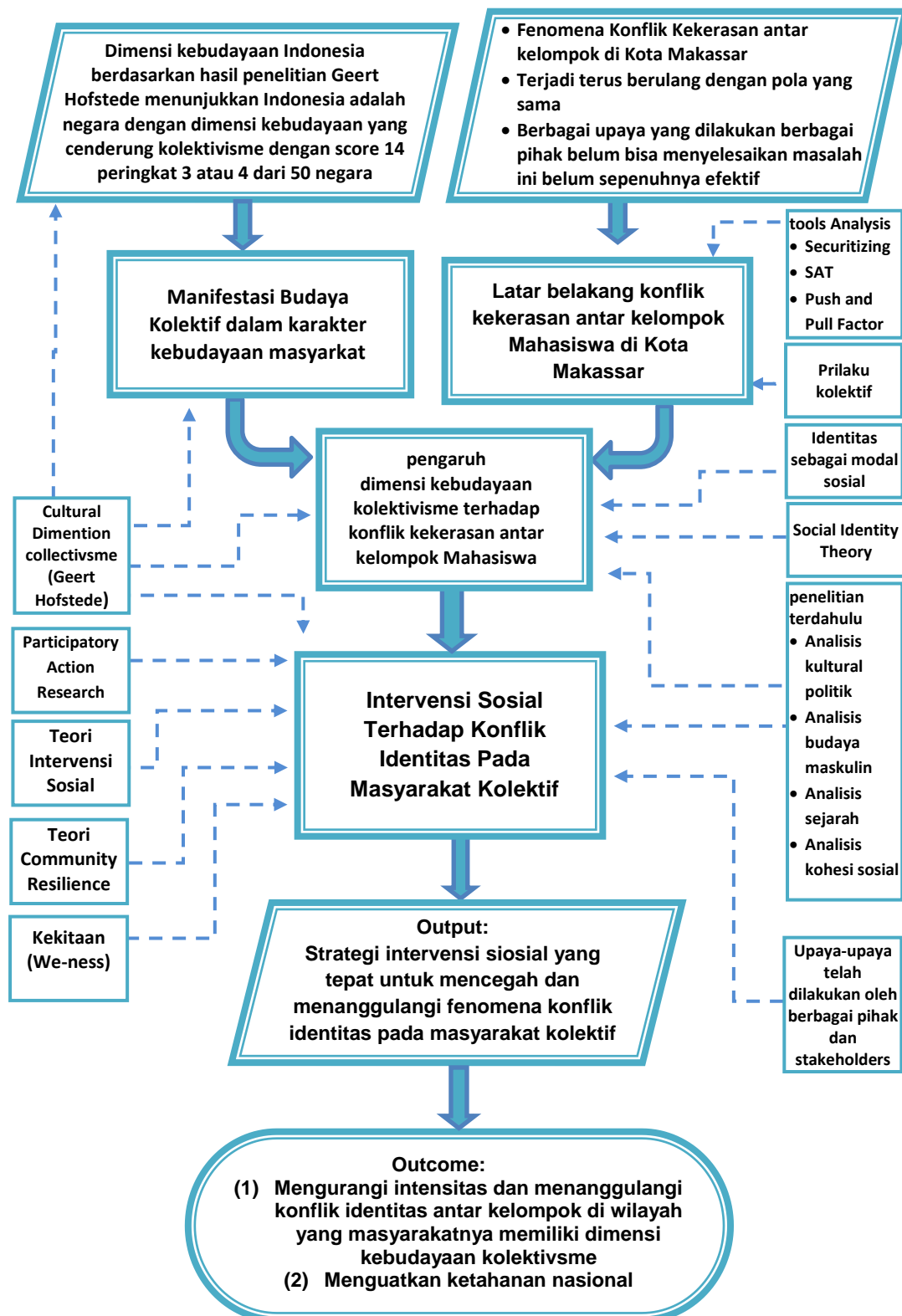
Walaupun Kacung Marjjan dan Hari Fitrianto (2013) mengangkat isu yang sama yaitu identitas kolektif sebagai penyebab konflik kekerasan, namun ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai cara pandang terhadap variabel ini. Kacung Marjjan dan Hari Fitrianto (2013) melihat Identitas kolektif ini terbentuk melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kolektif dari senior kepada junior (mahasiswa baru). Sosialisasi dan internalisasi tersebut biasa dilakukan ketika acara penyambutan mahasiswa baru yang berupa ospek di level universitas dan fakultas, maupun malam keakaraban di *level* jurusan, sedangkan peneliti sendiri melihat lebih mendalam dengan menggunakan perspektif budaya masyarakat Makassar sebagai modal sosial terjadinya konflik identitas di masyarakat kolektif. Adapun seremoni sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai

akan ditempatkan sebagai faktor yang menguatkan kohesi sosial atau ikatan kolektif yang sudah ada sebelumnya pada penelitian ini.

Perbedaan mendasar berikutnya pada tiga penelitian yang membahas konflik identitas di Makassar adalah penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian masalah dengan pendekatan intervensi sosial, sedangkan peneliti sebelumnya hanya mengurai permasalahan, kecuali Sayful (2015) yang memberikan saran rekomendasi sebagai bentuk resolusi konflik antara warga Pampang dan Sukaria. Walaupun sama-sama mencari solusi namun terdapat perbedaan metodologi untuk menemukan solusi pada kedua penelitian ini. Peneliti mencari dan menganalisis solusi melalui kegiatan intervensi sosial dengan pendekatan partisipatif yaitu menggunakan metodologi *participatory action research* (PAR).

Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Malik (2002) diangkat untuk menggambarkan kesamaan harapan pencapaian dalam penelitian ini. Karena sama-sama dilandasi oleh latar belakang konflik identitas, maka ada asumsi yang sama bahwa penyelesaian konflik identitas harus dilakukan dengan pendekatan identitas juga, dan penelitian yang dilakukan Ichsan Malik memaparkan mengenai hal tersebut dalam bentuk konsep ke-kita-an (*we-ness*).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.11 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Penulis